



Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar.

Nurul Arfiah Hasibullah ¹, Mursalim ², Muhammad Su'un ³.

Pascasarjana Universitas Muslim Indoneisa

ABSTRAK

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat pada pemerintah untuk kegiatan pembangunan di segala bidang, Pajak dapat dikatakan keharusan atau kewajiban yang dibayar oleh masyarakat pribadi maupun badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan Pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli konsumen. Populasi penelitian ini adalah konsumen kendaraan bermotor roda empat yang ditemui di kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan sample Slovin, Teknik analisis data yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu pengenaan PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen, PPnBM mempunyai pengaruh positif signifikan, serta PKB tarif progresif berpengaruh positif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif, Daya Beli.*

ABSTRACT

Taxes are obligations that must be paid by the public to the government for development activities in all fields. Taxes can be said to be imperatives or obligations paid by private and maupund bodies of society. This study aims to analyze the effect of the imposition of value added tax, sales tax on luxury goods and progressive motor vehicle tax on consumer purchasing power. The population of this study is four-wheeled motor vehicle consumers found in the office of the South Sulawesi Regional Revenue Agency. Collecting data using primary data obtained from a questionnaire using the Slovin sample, the data analysis technique is multiple linear regression analysis. consumer purchasing power, PPnBM has a significant positive effect, and PKB progressive tariffs have a positive effect on the purchasing power of consumers of four-wheeled vehicles.

Keywords: *Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods, Progressive Vehicle Tax, Purchasing Power.*

PENDAHULUAN

Pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, Untuk menaikkan target penerimaan pajak yang salah satunya diperoleh dari tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh daya beli konsumen. Salah satu pajak yang berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu negara khususnya di provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara adalah Pajak Pertambahan Nilai, naiknya harga disebabkan karena ada unsur PPN, jika harga sudah naik maka sangat berkaitan dengan daya beli, meskipun pemerintah mengatakan bahwa pengenaan PPN tidak begitu berdampak pada tingkat daya beli, tetapi setiap pengenaan PPN hanya dibebankan kepada konsumen bukan kepada pelaku industri.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang kurang populer di masyarakat umum, karena karakter dari PPnBM itu sendiri adalah pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak pabrikan, Konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah dipungut PPnBM. Direktorat Jenderal Pajak hanya mensosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan. Selain PPN dan PPnBM, pajak yang memberikan kontribusi pada pendapatan suatu negara khususnya pada daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I. PKB mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat rutin.

Pengenaan pajak-pajak tersebut tentunya akan memengaruhi harga jual kendaraan bermotor dan peningkatan beban pajak yang dapat ditimbulkan dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif. Masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat apabila mereka merasa terdapat peningkatan harga karena dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif.

Banyak faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap kendaraan bermotor roda empat, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Daya beli yang dimiliki konsumen tidaklah sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. (Rosidi 2017). Sejak 2012 lalu hingga 2019, pertumbuhan penjualan mobil dan niaga ringan di Sulsel naik hingga 40 persen. Namun secara kontribusi secara nasional, Sulsel berada di peringkat ketujuh, paling mampu membeli mobil di Indonesia, Berdasarkan data, Sulawesi Selatan menjadi kota yang memiliki daya beli yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan daya beli setiap tahunnya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik walaupun kondisi perekonomian yang fluktuatif, namun daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan. (Makassar.tribunnews.com).

Pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada daya beli konsumen untuk membeli

kendaraan roda empat. Pajak-pajak tersebut tentunya akan berpengaruh pada harga jual kendaraan bermotor dan akan menimbulkan peningkatan beban akibat adanya pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Peningkatan harga pada kendaraan bermotor roda empat karena dikenakannya PPN, PPnBM, dan kenaikan untuk membayar PKB dengan tarif progresif akan membuat masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat (Ratnasari, 2015). Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan di jalankan dengan 3 prinsip: kemampuan, manfaat, dan keadilan. Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Bab II pasal (2), maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pengenaan pajak pertambahan nilai kepada konsumen kendaraan roda empat dan pajak diberlakukannya tarif pajak progresif untuk pajak kendaraan bermotor menimbulkan berbagai dampak baik positif ataupun negatif, Dampak positif dari pemungutan PPN, PPnBM dan PKB adalah mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya, serta diharapkan mampu membuat masyarakat berpikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat guna menghindari pajak yang tentu akan menambah beban masyarakat, sehingga dapat menekan jumlah kendaraan bermotor roda empat di kota Jakarta (Nugraha,2012). Sisi negatifnya masyarakat sebagai wajib pajak dapat melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha,2012). Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli kendaraan khususnya kendaraan roda empat.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai daya beli konsumen kendaraan bermotor dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pajak pertambahan nilai. Dalam perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor swasta dan sektor pemerintah, perekonomian jenis ini sektor rumah tangga sebagai konsumen harus membayar pajak atas konsumsi barang atau jasa, pajak yang dibayarkan konsumen disebut pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah. Setiap pengenaan PPN harus seimbang dengan kemampuan masyarakat agar siklus dalam perekonomian tiga sektor ini dapat berjalan berdampingan (Rohman, 2015). Dengan semakin tingginya harga dari sebuah barang maka nilai ppn akan semakin tinggi pula (Pramesti dan Supadmi, 2017). Semakin tinggi beban pajak maka daya beli seseorang akan menurun. Hal tersebut sesuai dengan hasil (Ratnasari & Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa ppn mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Sambur, (Sondakh dan Sabijono, 2015) menyatakan bahwa ppn tidak mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, sedangkan (Pramesti & (Supadmi, 2017) mengungkapkan hasil yang berbeda yaitu ppn mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan oleh (Wisnu, 2015) menunjukkan hasil bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Bali. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang

meningkat sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor mengakibatkan konsumen merasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga konsumen akan menekan pembelian untuk kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini penting untuk dilakukan kembali, hal ini karena hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan antara PPN, PPnBM, dan tarif progresif PKB dan daya beli masyarakat menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Peneliti ini akan membahas “Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Makassar.”

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Asas Daya Beli

Teori asas daya beli adalah teori yang menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat pada negara yang bersangkutan. Selain itu, teori asas daya beli berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak lain. Barang yang dibeli oleh masyarakat sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga barang mewah. Pajak yang berhubungan dengan transaksi ini dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Teori Prestise

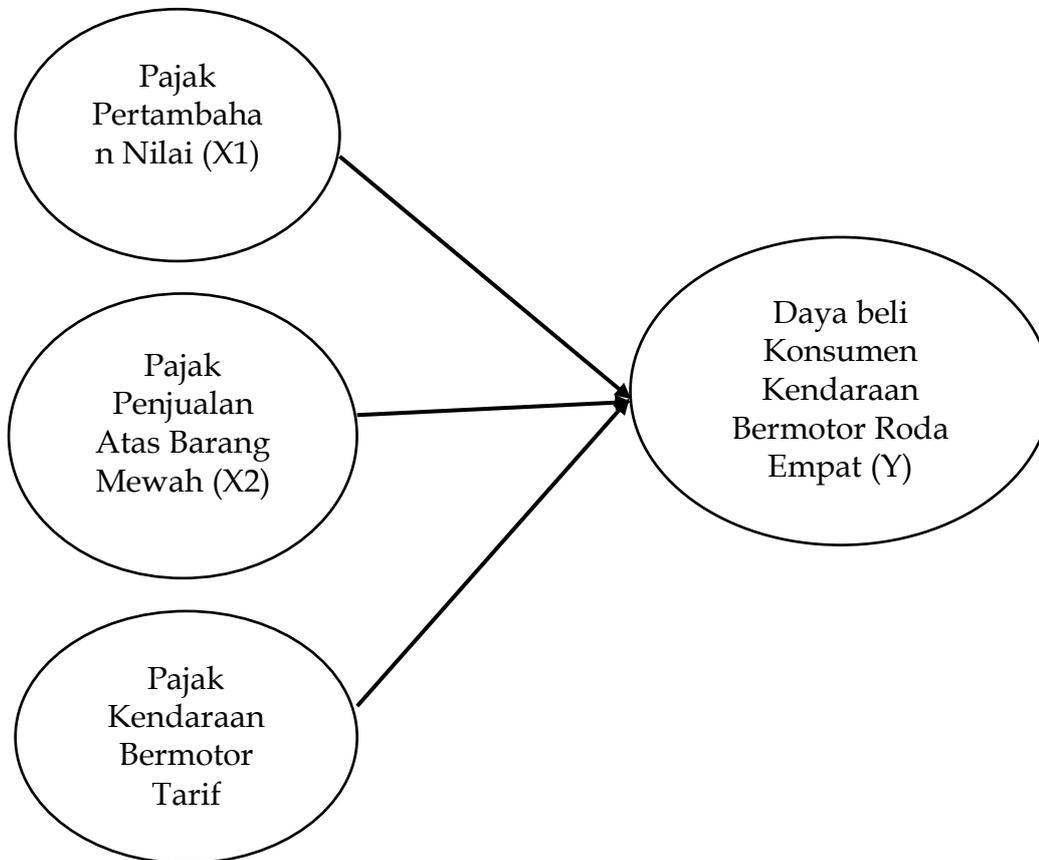
Prestise adalah sebuah kehormatan atau wibawa yang didapatkan oleh seseorang karena kemampuannya dalam memiliki berbagai macam hal (terkait dengan kekayaan ataupun barang prestise) yang kemudian membuatnya menjadi berbeda atau istimewa bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya (Febe, 2015). Prestise merupakan keadaan dimana seseorang merasa mempunyai kebanggaan tersendiri pada saat mengkonsumsi barang dan atau jasa tertentu. Setiap orang membutuhkan penghargaan prestise dari lingkungannya. Semakin tinggi status dan kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan prestise diri yang bersangkutan (Prabowo, 2014).

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur dan distribusi (Sumartaya, 2003).

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Atau pun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut (Faizal, 2010) mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah. Kendaraan yang dimaksud yaitu semua kendaraan beroda, serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak (Waluyo, 2011). Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, dalam penggunaan kendaraan bermotor itu wajar apabila pemerintah mengenakan pajak untuk setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pajak yang dibebankan tersebut akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya.

Kerangka Konseptual



1. Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. (Dyah, 2010), (Fadilah, 2012), dan (Raja, 2014) mengatakan

bahwa PPN mempunyai pengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen. Sebab pajak akan secara langsung dibebankan dalam setiap konsumsi yang dilakukan konsumen.

H1: *Pengenaan PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.*

2. Pengenaan PPnBM Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan, mengimpor, atau mengeksport barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pajak penjualan atas barang mewah dapat mempengaruhi kemampuan membeli konsumen terhadap nilai jual suatu barang. Penelitian (Fandy, 2014) menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor. Penelitian tersebut memiliki hasil yang konsisten dengan (Claudya, 2015) (Evina, 2015), (Pramesti, 2017) dan (bdurrahman, 2014) menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen dan (Mariska, 2015). Gengsi dan daya beli yang sangat menentukan pembelian kendaraan bermotor.

H2 : *Pengenaan PPnBM berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.*

3. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tarif Profresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Roda Empat.

PKB ialah pajak yang dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Alasan pemungutan PKB karena penggunaan jalan raya oleh masyarakat. Objek dari PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB yaitu orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Tarif progresif ditetapkan senilai 1,5 persen untuk kepemilikan pertama, kendaraan kedua senilai 2 persen PKB ialah pajak yang dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Alasan pemungutan PKB karena penggunaan jalan raya oleh masyarakat. Objek dari PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB yaitu orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Tarif progresif ditetapkan senilai 1,5 persen untuk kepemilikan pertama, kendaraan kedua senilai 2 persen bagi kendaraan ketiga senilai 2,5 persen, bagi kendaraan keempat senilai 3 persen, serta bagi kendaraan kelima dan seterusnya senilai 3,5 persen.

Penelitian (Murthi, 2015) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Hal ini dikarenakan industri otomotif tengah berkembang pesat. Para pelaku insdustri mengeluarkan ragam produk otomotif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, sejumlah fasilitas yang semakin canggih dan memberi kenyamanan tetap menajdi primadona bagi masyarakat.

Kondisi ini terbukti dari penjualan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang kian meningkat.

H3 : *Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tarif Progresif berpengaruh Positif Dan tidak signifikan terhadap daya beli Konsumen kendaraan roda empat.*

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat di Kantor badan pendapatan daerah Sulawesi Selatan . Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling.

1. Variabel Independen (X)

a. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang digolongkan sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan, mengimpor, atau mengeksport Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

c. Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pajak kendaraan dengan tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan persentase yang naik dengan jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai dasar pengenaan pajak.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan seseorang dalam membeli barang atau jasa yang dikehendaki atau diperlukan. Daya beli satu orang dengan yang lain tentu saja berbeda. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti perubahan pendapatan konsumen, perubahan harga barang pengganti, perubahan harga barang komplementer, dan perubahan cita rasa konsumen. Dengan asumsi bahwa daya beli konsumen terhadap pengenaan PPN,PPnBM dan PKB dengan Tarif Progresif atas Kendaraan Roda Empat. Setiap responden diminta menjawab 7 pertanyaan. Jawaban pertanyaan disusun dengan menggunakan skala likert 5 poin antara 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi).

Tabel : Variabel, Indikator, dan Skala Pengukuran.

No	Variabel	Indikator	No Pertanyaan	Skala Pengukuran
1	Pajak Pertambahan Nilai	a. Tarif PPN	1	Likert
		b. Kepatuhan	2	
		c. Pengenaan PPN	3	

	(PPN)	d. Sistem Pengenaan PPN	4	
		e. Nilai Jual Barang	5	
		f. Harga barang	6	
		g. Mekanisme Pengenaan PPN	7	
2	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	a. Penggolongan PPnBm	1	Likert
		b. Pengenaan PPnBM	2	
		c. Tarif PPnBm	3	
		d. Fungsi PPnBM	4	
		e. Pemungutan PPnBM	5	
		f. Pengenaan PPnBM	6	
		g. Tujuan PPnBM	7	
3	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif	a. Tarif PKB	1	Likert
		b. Dasar pengenaan PKB	2	
		c. Nilai jual	3	
		d. Kepatuhan membayar pajak	4	
		e. Denda pajak	5	
		f. Bobot perhitungan PKB	6	
4	Daya beli Konsumen	a. Kemampuan Masyarakat	1	Likert
		b. Nilai PPN	2	
		c. Barang Kena Pajak	3	
		d. Pendapatan	4	
		e. Harga	5	
		f. Kebutuhan	6	
		g. Kemampuan Daya Beli	7	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode analisis data

1. Uji kualitas data Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel diatas, daapt diketahui bahwa variabel pajak pertambahan nilai memiliki rentang nilai dari 16 hingga 35. Nilai rata-rata ppn 29,54 dan deviasi standarnya 3,707. variabel pajak pertambahan nila atas barang mewahi memiliki rentang nilai dari 16 hingga 34. Nilai rata-rata PPnBM 30,26 dan deviasi standarnya 3,145. Variabel pkb tarif progresif memiliki rentang nilai 16 hingga 30. Nilai rata-rata pkb tarif progresif 24,58 dan deviasi standarnya 2,559. Nilai daya beli konsumen memiliki rentang nilai 22 hingga 35. Nilai rata-rata daya beli konsumen 29,71 dan deviasi standarnya 2,456.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
PPN	80	16	35	29,54	3,707
PPnBM	80	16	34	30,26	3,145
PKB Tarif Progresif	80	16	30	24,58	2,559
Daya Beli Konsumen	80	22	35	29,71	2,456
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data Olahan SPSS (2020)

Validitas

Dari tabel diketahui bahwa semua butir instrument variabel bebas (PPN, PPnBM dan PKB tarif progresif) dan variabel terikat (Daya beli konsumen) (Y) dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,30). Berdasarkan nilai uji validitas butir instrumen seluruh variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian sudah representatif. Dalam artian mampu mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat.

Variabel	r _{hitung}	Keterangan	
PPN (X1)	X1.1	0,841	Valid
	X1.2	0,539	Valid
	X1.3	0,710	Valid
	X1.4	0,830	Valid
	X1.5	0,565	Valid
	X1.6	0,830	Valid
	X1.7	0,654	Valid
PPnBM (X2)	X2.1	0,631	Valid
	X2.2	0,562	Valid
	X2.3	0,358	Valid
	X2.4	0,756	Valid
	X2.5	0,665	Valid
	X2.6	0,788	Valid
	X2.7	0,510	Valid
PKB TARIF PROGRESIF (X3)	X3.1	0,351	Valid
	X3.2	0,720	Valid
	X3.3	0,753	Valid
	X3.4	0,732	Valid
	X3.5	0,805	Valid
	X3.6	0,501	Valid
DAYA BELI KONSUMEN (Y)	Y1	0,557	Valid
	Y2	0,685	Valid
	Y3	0,649	Valid
	Y4	0,566	Valid
	Y5	0,511	Valid
	Y6	0,419	Valid
	Y7	0,483	Valid

Sumber: Data olahan SPSS (2020)

Realibilitas

Dari tabel diketahui bahwa variabel (X1) PPN dengan koefisien alpha sebesar 0,736. Variabel (X2) Pelayanan PPnBM dengan koefisien alpha sebesar 0,762. Variabel (X3) PKB Tarif Progresif dengan koefisien alpha sebesar 0,761. Variabel terikat (Daya beli konsumen) dinyatakan dengan koefisien alpha sebesar 0,724 dinyatakan reliabel karena Koefisien alpha > (0,60). Berdasarkan nilai uji Reliabilitas butir instrumen seluruh variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian sudah handal, dalam artian telah lulus uji Instrumen dengan menggunakan uji reliabilitas.

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
PPN (X1)	0,736	Reliabel
PPnBM (X2)	0,762	Reliabel
PKB Tarif progresif (X3)	0,761	Reliabel
Daya beli konsumen (Y)	0,724	Reliabel

Sumber: Data olahan SPSS (2020)

2. Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Berdasarkan output SPSS, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,349 yang mengartikan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini memenuhi uji Asumsi Klasik pada Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30972722
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,070
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,349 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

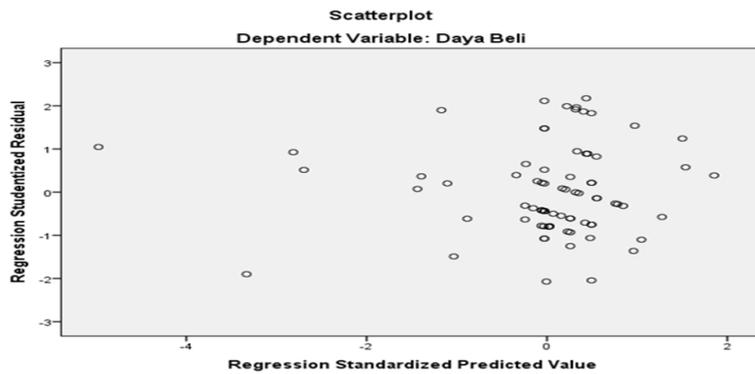
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data olahan spss (2020)

Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh pengenaan PPN, PPnBM dan PKB tarif progresif terhadap daya beli konsumen.



Uji Multikolinearitas

Berdasarkan output SPSS diketahui bahwa nilai Tolerance dan VIF PPN (X1) yaitu Tolerance dengan nilai $0,759 > 0,10$ dan VIF dengan nilai $1,317 < 10$ artinya tidak terjadi Multikolinearitas pada variabel tersebut. nilai Tolerance dan VIF PPnBM (X2) yaitu Tolerance dengan nilai $0,742 > 0,10$ dan VIF dengan nilai $1,348 < 10$ artinya tidak terjadi Multikolinearitas pada variabel tersebut. nilai Tolerance dan VIF PKB (X3) yaitu Tolerance dengan nilai $0,876 > 0,10$ dan VIF dengan nilai $1,142 < 10$ artinya tidak terjadi Multikolinearitas pada variabel tersebut. dikatakan memenuhi jika nilai nilai Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Dengan demikian disimpulkan bahwa data ini memenuhi uji Asumsi Klasik pada Uji Multikolinearitas.

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PPN	,759	1,317
PPnBM	,742	1,348
PKB	,876	1,142

a. Dependent Variable: Daya beli

Sumber : Data olahan SPSS (2020)

3. Uji hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	beta		
1 (Constant)	2,067	,428		4,833	,000
PPN	,054	,075	,081	,714	,477
PPnBM	,264	,091	,331	2,892	,005
PKB	,197	,087	,238	2,260	0,277

a.dependentVariable : Daya beli

Sumber: Data olahan SPSS (2020)

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk standardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 2,067 + 0,054 X_1 + 0,264 X_2 + 0,197 X_3$$

Model persamaan persamaan regresi unstandardized Coefficients, nilai koefisiennya sebagai berikut:

- Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 2,067 . Hal ini menyatakan bahwa jika Variabel pajak pertambahan nilai (PPN) , pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan PKB Tarif progresif dianggap konstan, maka daya beli (Y) akan meningkat sebesar 15,292.
- Koefisien regresi pada (X1) sebesar 0,054, hal ini berarti jika variabel PPN menunjukkan bahwa dengan penambahan 1% pada daya beli (Y) maka akan terjadi peningkatan pada PPN sebesar 0,054.
- Koefisien regresi pada (X2) sebesar 0,264, hal ini berarti jika variabel PPnBM menunjukkan bahwa dengan penambahan 1% pada daya beli (Y) maka akan terjadi peningkatan pada PPnBM sebesar 0,264.
- Koefisien regresi pada (X3) sebesar 0,197 hal ini berarti jika variabel PKB tarif Progresif menunjukkan bahwa dengan penambahan 1% pada daya beli (Y) maka akan terjadi pada PKB Tarif Progresif peningkatan sebesar 0,197

Hasil uji Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	beta	t	Sig.
1 (Constant)	2,067	,428		4,833	,000
PPN	,054	,075	,081	,714	,477
PPnBM	,264	,091	,331	2,892	,005
PKB	,197	,087	,238	2,260	0,277

a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Data olahan SPSS (2020)

Pengujian dengan membandingkan nilai probabilitas thitung dengan probabilitas 0,05. Apabila nilai thitung > ttabel sebesar 1,665, seta nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima.

Hasil uji simultan (uji-f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,657	3	,886	8,882	,000 ^b
Residual	7,579	76	,100		
Total	10,236	79			

a. Dependent Variable: Daya beli
b. Predictors: (Constant), PKB,PPN,PPnBM
Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara Bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar $8,882 > F_{tabel}$ sebesar $2,489$ dengan nilai signifikansi (sig) sebesar $(0.000) < (0,05)$ maka pada tingkat Kesalahan 5% dapat dikatakan bahwa PPN, PPnBM dan PKB Tarif Progresif signifikan secara simultan terhadap Daya beli.

Koefisien determinasi (R^2).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,509 ^a	,260	,230	,31578	1,860

a. Predictors: (Constant), PKB,PPN,PPnBM

b. Dependent Variable: Daya Beli

Sumber: hasil olahan SPSS (2020)

Dari data pada tabel 22 Model Summary tersebut, bahwa variable Daya beli dapat dijelaskan oleh variabel PPN, PPnBM, PKB tariff progresif sebesar 0,230 atau 23,0%. Sedangkan sisanya sebesar 0,77 atau 77 % dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengenaan PPN Terhadap Daya beli Konsumen pada Roda Empat.

Hasil uji parsial diketahui bahwa variabel PPN tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap daya beli konsumen pada roda empat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengenaan PPN tidak terlalu diperhitungkan dalam memprediksi daya beli konsumen, sebab membuktikan bahwa PPN tidak mempunyai pengaruh pada daya beli konsumen. Hal ini karena tarif Pajak Pertambahan Nilai yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi daya beli konsumen.

Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah dikenakan PPN yang sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang dipikul. (Idha Ayu 2015). Salah satu faktornya, menurut teori Prestise adalah sebuah kehormatan atau wibawa yang didapatkan oleh seseorang karena kemampuannya dalam memiliki berbagai macam hal (terkait dengan kekayaan ataupun barang prestise) yang kemudian membuatnya menjadi berbeda atau istimewa bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya (Febe, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPN tidak berpengaruh terhadap Daya beli konsumen . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil oleh Noviane (2015) dan Febe (2015) menyatakan bahwa PPN tidak mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen. mengungkapkan bahwa PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen

2. Pengaruh Pengenaan PPnBM Pelayanan Terhadap Daya Beli Konsumen Roda Empat.

Hasilnya diketahui bahwa variabel PPnBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Daya beli konsumen roda empat . Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara PPnBM dengan Daya beli konsumen roda empat.

Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Artinya semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah yang tarifnya lebih tinggi dari pajak pertambahan nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor. Gengsi dan daya beli yang sangat menentukan pembelian kendaraan bermotor. Walaupun memang belum semua masyarakat yang mengerti benar tentang PPnBM namun tidak menurunkan niat untuk membeli, dikarenakan kebutuhan gengsi sebagai penegasan dari status sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Daya beli konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian [Raja \(2014\)](#) menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. [Yunita \(2015\)](#) menyatakan hal yang serupa yaitu PPnBM berpengaruh positif pada daya beli konsumen. Begitupun dengan [Fandy \(2014\)](#) menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Pengenaan PKB Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen Roda Empat

Hasilnya diketahui bahwa variabel PKB tarif Progresif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap daya beli konsumen roda empat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara PKB Tarif progresif dengan daya beli konsumen roda empat.

Dengan adanya pendapatan yang tinggi, masyarakat tidak akan keberatan mengenai harga jual barang, untuk hal ini harga jual kendaraan bermotor. Masyarakat akan tetap membeli kendaraan bermotor walaupun terjadi peningkatan jumlah beban pajak yang dikenakan karena masyarakat masih mampu untuk membayar beban pajak tersebut ([Chaerannisah, 2014](#)).

Hasil peneltian ini sejalan dengan teori teoriprestise dan asas daya beli. Teori asas daya beli dicetuskan oleh Prof. Dr.P.J.A.Adriani, fungsi pajak didalam masyarakat disamakan dengan pompa, yaitu menyedot atau mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memberikan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat inilah yang mampu dijadikan sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan untuk kepentingan yang lainnya, melainkan kepentingan masyarakat.Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini menitik beratkan ajarannya pada fungsi pajak sebagai pengatur (regulerend). Selain itu, teori asas daya beli berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak lain. Pajak yang berhubungan dengan transaksi ini dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor ([Mardiasmo, 2011:4](#)).

Hasil penelitian menunjukkan PKB tarif progresif berpengaruh terhadap Daya beli konsumen. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian [Ratnasari \(2015\)](#) dan [Pramesti \(2017\)](#). mengemukakan bahwa PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada daya beli konsumen. Konsumen akan terasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi akibat adanya kenaikan tarif PKB sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga konsumen akan melakukan penekanan pada pembelian untuk kendaraan bermotor roda empat. Namun hasil penelitian [Murthi \(2015\)](#) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Hal ini dikarenakan industri otomotif tengah berkembang pesat.

KESIMPULAN

1. Pengenaan PPN tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada daya beli konsumen kendaraan roda empat,
2. Pengenaan PPnBM berpengaruh positif dan signifikan pada daya beli konsumen kendaraan roda empat;
3. Pengenaan PKB dengan tarif progresif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan daya beli konsumen kendaraan roda empat.
4. Pengenaan PPN, PPnBM dan PKB tarif progresif berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap daya beli konsumen roda empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, R (2014). *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor* (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang). EJurnal Umrah.
- Dyah A, (2010). *Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik* (Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronik Di Wilayah Tangerang Selatan)
- Evina, S, Lili S., Cherya D. W, (2014). *Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen di Kota Palembang*. Jurnal STIE MDP.
- Fadilah, (2012). *Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik* (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronik di Glodok Jakarta Kota). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Faizal, (2010). *Sistem Informasi Pengolahan Data Pajak Kendaraan Bermotor Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Menggunakan Visual Basic*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15 .
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mariska, F., (2015). *Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang*

Elektronika (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Jalan ABC Kota Bandung). Skripsi Universitas Kristen Maranatha

- Murthi, N. W., Made K, Sri B, Ida B. P, (2015). *Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 4 No. 12, pp: 10011048.
- Pramesti, S. A. P. D. and Supadmi, N. L. (2017) '*Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat*', E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18, pp. 674-704.
- Prabowo, F. P, (2014). *Pengaruh Penerapan PMK No121/PMK.011/2013 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronika (Studi Empiris Konsumen Barang Elektronika di Wilayah DKI Jakarta)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ratnasari, I. A. P, (2015). *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan di Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15 No. 2, pp: 887-914.
- Rosidi, I, (2017). *Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Daya Beli Konsumen*. Skripsi
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.